

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN TERHADAP KUALITAS
PELAYANAN DI KABUPATEN BULUKUMBA**



**OLEH
ANDI NUR REZKY LESTARI
B 121 12 132**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN TERHADAP KUALITAS
PELAYANAN DI KABUPATEN BULUKUMBA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

disusun dan diajukan oleh
ANDI NUR REZKY LESTARI
B 121 12 132

**PRODI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN BULUKUMBA.

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NUR REZKY LESTARI

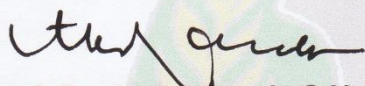
B121 12 132

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 29 Februari 2016
Dan Dinyatakan Diterima

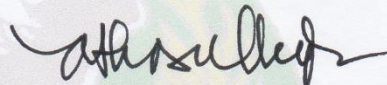
Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,



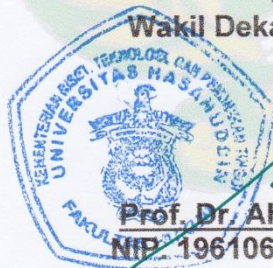
Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 19571029 198303 1 002



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 001

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Andi Nur Rezky Lestari

Nomor Pokok : B121 12 132

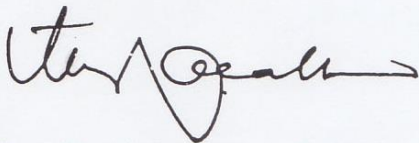
Prodi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Yuridis Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap Kualitas Pelayanan di Kabupaten Bulukumba.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi Hukum Administrasi Negara.

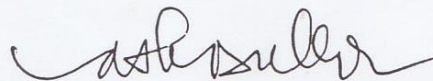
Makassar, Februari 2016

• Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 19571029 198303 1 002

Pembimbing II



Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI NUR REZKY LESTARI**
No. Pokok : B121 12 132
Prodi : Hukum Administarsi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perubahan Status Desa Menjadi
Kelurahan Terhadap Kualitas Pelayanan di Kabupaten
Bulukumba

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016



a.n. Dekan

Wakil Dekan II

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NID. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

ANDI NUR REZKY LESTARI (B 121 12 132), dengan judul “Tinjauan Yuridis Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap Kualitas Pelayanan di Kabupaten Bulukumba (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan)” Dibimbing oleh **Abdul Razak** selaku pembimbing I dan **Zulkifli Aspan** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme dari perubahan status desa menjadi kelurahan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Kantor Camat Ujung Buludan Kantor Lurah Tanah Kongkong. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan nara sumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan syarat-syarat administrasi Pasal 9 Ayat (2) Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 untuk melaksanakan proses alih status menjadi kelurahan telah terpenuhi. Namun ada ketidaksesuaian dengan mekanisme proses pelayanan terhadap masyarakat setempat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 Tahun 2007 diantaranya, yaitu ; prakarsa untuk mengubah status Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat tetapi tidak ada kordinasi dari Pemerintah Kab. Bulukumba. Kendala dalam proses alih status Desa Tanah Kongkong menjadi kelurahan terkait masalah kurangnya pelayanan terhadap masyarakat dan belum ada pembicaraan antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa terhadap status para Perangkat Desadan BPD pasca dialihkannya status Desa Tanah Kongkong menjadi kelurahan.

Kata kunci :TinjauanYuridis, Perubahan status, Desa, Kelurahan

PENGANTAR PENULIS



Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan begitu banyak Nikmat, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi berjudul : **“Tinjauan Yuridis Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap Kualitas Pelayanan di Kabupaten Bulukumba”**. Shalawat serta salam juga yang akan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dimana Beliau adalah manusia yang berakhlak mulia yang telah menyelamatkan seluruh manusia ke alam yang gelap ke zaman yang lebih baik dari yang pernah ada. Beliau adalah sumber inspirasi, semangat, dan tingkah lakunya menjadi pedoman hidup bagi Penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sosok yang telah mendampingi upaya-upaya Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Terutama kepada **Ayahanda Andi Usman Ali A. Bintang.S.E** dan **Ibunda Andi Hikmawati. S.H.,M.Kn** yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, terkhusus kepada Ibunda tercinta yang benar-

benar memberikan dukungan penuh serta motivasi dalam hidup penulis. Tidak lupa juga seluruh Keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan atau pun masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat sampai pada ujung Proses Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016 ini.

Teristimewa penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-sedarah kuter cinta yakni : **Andi Nur Chamidah Wulandari, Andi Nur Sakinah Trimeilana dan Andi Nur Fatwa Febrian**. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang dilandasi dengan ketulusan kalian untuk penulis selama menempuh pendidikan demi menggapai cita – cita penulis.

Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Razak S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang telah banyak berperan memberikan bimbingan serta arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besanya juga penulis khaturkan atas bimbingan, saran dan kritik yang sangat bersifat membangun dari bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H** selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara, serta beberapa Tim Penguji Skripsi Penulis yakni :

**1) Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H.,
M.H;**

2) Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H;

3) Bapak Dr. Naswar Bohari, S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, Penulis juga menyampaikan rasa
Hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. yang telah sabar mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran dalam pemberian saran dan motivasi.
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H , Bapak Kasman Abdullah S.H., M.H, Bapak Dr. Zulkifli Aspan S.H., M.H., Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H, Kak Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H, Dosen yang selalu mengarahkan, memotivasi dan membantu kegiatan mahasiswa program studi hokum administrasi negara.
5. Seluruh Dosen yang sering kumpul di Ruang Dapur Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga

penulisan karya ini sebagai tugas akhir. Penulis sangat berterima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya.

7. Keluarga Besar SD Kuncup Pertiwi, SMPN 1 Kendari, SMAN 4 Kendari, dan Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat Penulis belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan sampai saat ini.
8. Keluarga Besar Recht Choir Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah member semangat untuk menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Teman-teman Angkatan Prodi Hukum Administrasi Negara dan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2012 yang telah membimbing saya sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum selama kuliah S1 hingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga Tercinta Andi Rosali Lion, Andi Batari, dan Andi Imam Septiawan Terima kasih atas bantuan dan arahan selama melakukan penelitian dan penyusunan tugas akhir.
11. Sahabat-sahabat di Prodi Hukum Administrasi Negara (Indah Nur Haryati, Zakiyah Auliah Akbar, Ferliana Harman, Tuti Hardiyanti, Ida Farahdiba, Cindy Triana S, Nur Hakiki, dan Syukranah Yusuf), yang mengajarkan kesederhanaan dibalik tirai persahabatan, pentingnya berbagi, mengajarkan

kebersamaan, pentingnya persaudaraan sejati, senang dan bangga bias mengenal kalian).

12. Teman Magang Kelompok 6 di Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Makassar, yakni Zakiyah Auliah Akbar, Indah Nur Haryati, Andi Nurannisa Meilany, Andi WikaPutri, Andi Muh. Pasuloi, dan Hanfree Bunga'allo
13. Teman – teman yang selalu mendampingi penulis dari Semester Awal Perkuliahan hingga akhir semester, yakni Yasin, Bambang, Waris, Arya, Bille, Rahmat suci, Abdi, Bayu, Dian, Ichfak, Kiki ridwan, Victoria, dll
14. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten bulukumba, Camat Ujung Bulu, dan Lurah Tanah Kongkong, terima kasih atas izin penelitian dan arahnya selama penelitian dan penyusunan tugasakhir.
15. Sahabat – sahabat Osis-Mpk 2011/2012 SMAN 4 Kendari terima kasih atas kenangan kebersamaannya selama berorganisasi
16. Sahabat-sahabat seangkatan 2012 (PETITUM) Fakultas Hukum UNHAS, terima kasih telah berbagi banyak ilmu, pengalaman, dan persahabatan.
17. Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata Reguler Kab. Bulukumba kecamatan Ujung Bulu, terima kasih atas pengalamannya dalamber-KKN.

18. Sahabat – sahabat InstaZero (Fhemy, Septy, Cindy, Rama, Alam, Ade, Wandy, Uji, Arul, dan Alul) Terima Kasih atas dukungan kepada penulis
19. Sahabat Gengges tercinta (Intan, Fhemy, Tamy, Ayi, Rani, Reni, dan Dinda)
20. Sahabat-sahabat terbaik yang sering menemani dalam keadaan senang maupun duka, yakni Ajeng Sukma Indra, Febrianty Indaswary, Prameswari Mustanzier, dan Dila Arisandi.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritikk yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bias diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Makassar, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
PEGANTAR PENULIS	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah`	11
C. Tujuan Masalah	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom	13
1. Pengertian Otonomi daerah dan daerah otonom	13
2. Asas – asas Pemerintahan Daerah	14
a. Asas Desentralisasi	15
b. Asas Dekonsentrasi.....	18
c. Asas Pembantu	19
3. Urusan Pemerintahan Daerah	21
a. Urusan Pemerintahan absolut	22
b. Urusan Pemerintahan Konkuren	23
c. Urusan Pemerintahan Umum	25
B. Pelayanan Publik	26
1. Pengertian Pelayanan Publik	27
2. Pelaksanaan Pelayanan Publik	29
3. Ruang Lingkup Pelayanan Publik	31
C. Desa dan Kelurahan	34

1. Desa	34
a. Pengertian Desa	34
b. Pemerintahan Desa	35
c. Otonomi Desa	39
2. Kelurahan	41
a. Fungsi Kelurahan	42
b. Struktur dan Kelembagaan	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber data	46
C. Teknik Pengambilan data	47
D. Analisis Data	47
E. Populasi dan Sampel	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Mekanisme Perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba	49
B. Dampak Perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom¹. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Gubernur yang berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, berfungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

¹ Pasal 1 (3) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.³

Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, maka dibentuklah Kecamatan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan persetujuan Pemerintah Pusat dan Gubernur Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 222 ayat (1) serta Pasal 224 ayat (1).

Pemerintah Desa terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 371 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³ Pasal 70 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

⁴ Pasal 1 (2) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Adapun Desa-desa yang ada di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan Desa-desa yang berada di dalamnya yang belum menjadi Kelurahan, ditetapkan menjadi Desa. Sampai awal Pelita lima 1989 Desa-desa di seluruh Indonesia berjumlah 61.975 buah.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan⁵

Kondisi Pemerintahan Kelurahan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tidak menunjukkan secara jelas status suatu wilayah yang disebut Desa dan yang disebut Kelurahan sebagaimana menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Untuk memudahkan pengaturan selanjutnya perlu diadakan penetapan terhadap Desa-desa yang ada sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Olehnya itu Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Desa-desa atau nama asli yang setingkat dan berada di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya, dan Kota Administratif menjadi Kelurahan. Berdasarkan data 2012, terdapat 6.793 kecamatan dan 79.075 kelurahan/desa di Indonesia⁶

Pemerintah Kelurahan yang dikepalai seorang Lurah, dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

⁵ Pasal 1 (5) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan
⁶Suryamin, 2015. *Statistik Indonesia*, Badan Pusat Statistik/ BPS - Statistics Indonesia, hlm 31

pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain tugas tersebut seorang Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan Pemerintahan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam suatu Kelurahan terdapat perangkat Kelurahan yang terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya empat seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah/Kota.

Pemerintah Kelurahan sebagaimana pada Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pasal 23 (1) Pemerintahan Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan (2) Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepal lingkungan

Desa adalah bentuk kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah didalam Negara Kesatuan republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Kewenangan otonomi pada desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Otonomi desa merupakan otonomi yang berdasar asal-usul dan adat-istiadat setempat yang dihasilkan dari berbagi interaksi antar individu dalam masyarakat atau merupakan hasil, cipta, rasa, dan karsa masyarakat dalam kenyataan pasti akan timbul keanekaragaman, baik keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman, asal-usul dan adat istiadat masyarakatnya.⁸ Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin dilingkungan desa tersebut baik Kepala Desa maupun Kepala Dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh

⁷Widjaja. HAW, 2005, *penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Palembang : Rajawali pers, hlm 37

⁸ Ibid, hlm 88

pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat. Kekayaan desa yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, swadaya masyarakat maupun yang bersifat turun-temurun, dikelola bersama sebagai sumber penghasilan perangkat maupun sumber pendapatan desa.

Kelurahan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah, merupakan lembaga daerah dengan jabatan struktural baik yang memimpin unit maupun sub unit organisasi, dan seluruh pegawai yang ada didalamnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perubahan status sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dari desa menjadi kelurahan akan membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik masyarakat desa maupun unsur pemerintahan desa. Masyarakat akan dibawa kepada sistem pengaturan dan pelayanan masyarakat berdasarkan sistem birokrasi Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pemerintah desa akan berubah secara mendasar yaitu terhapusnya lembaga perwakilan masyarakat, terhapusnya sistem pemilihan dalam pengangkatan pimpinan, karena kelurahan merupakan perangkat daerah atau lembaga struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dan pengangkatan pegawai dilingkungan kelurahan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Lembaga kelurahan terdiri dari jabatan struktural dalam eselon IV

(empat) yang untuk menduduki jabatan tersebut harus dilandasi dengan persyaratan pangkat, kemampuan, serta pendidikan dan pelatihan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 126 ayat (2) tidak memberikan alternatif dalam perubahan status tersebut, tapi secara otomatis semua desa yang berada diwilayah kotamadya, kotamadya administratif, dan kota administratif menjadi kelurahan tanpa memperhatikan faktor sarana dan prasarana, potensi dan karakter masyarakatnya sudah siap atau sudah memenuhi syarat untuk menjadi kelurahan. Konsekwensi dari pengaturan tersebut adalah, bahwa pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan dan memfasilitasi desa-desa yang ada diwilayahnya untuk menjadi kelurahan. Perubahan yang cukup mendasar adalah status personil, menimbulkan keresahan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan antara lain mengatur Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Cukup banyak permasalahan yang timbul dan dilema yang dihadapi sebagai akibat ketentuan tersebut, karena belum jelasnya kriteria untuk perubahan status perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya peluang/kemungkinan para perangkat desa menjadi pegawai

negeri sipil karena faktor usia dan pendidikan (usia melebihi usia pensiun dan tidak ada ijazah), padahal para perangkat desa tersebut telah lama mengabdikan sebagai perangkat desa di desa tersebut.

Situasi sementara ini adalah reaksi Kepala Desa dan perangkat desa terhadap isu perubahan status desa menjadi kelurahan, adalah tuntutan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), adanya pemberian penghargaan yang layak bagi perangkat atau Kepala Desa yang telah purna tugas atau berakhir masa jabatannya, tuntutan untuk tetap mengelola tanah bengkok serta asset desa tetap dikelola oleh kelurahan dan atau adanya kontribusi yang layak bagi kelurahan atau masyarakat kelurahan. Reaksi keras pada beberapa kota ditunjukkan dengan pembentukan paguyuban perangkat desa yang memotori dalam mengupayakan berbagai tuntutan kepada pemerintah kota/kabupaten.

Dalam rangka memahami permasalahan, kendala serta mencari solusi pemecahannya maka perlu digali informasi baik dari pemerintah kota/kabupaten, pemerintah desa maupun masyarakat tentang persepsi, pemahaman serta pendapatnya sehubungan dengan ketentuan perubahan status desa menjadi kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, yaitu Sebelum beralihnya status desa menjadi kelurahan maka diperlukan pengaturan sarana dan prasarana perkantoran dan beralihnya status

desa menjadi kelurahan, maka administrasi pemerintahan akan dialihkan dan disesuaikan oleh kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan mengenai pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Kondisi saat ini pemerintahan kelurahan banyak melakukan perubahan oleh masyarakat pada kelurahan khususnya di Kabupaten bulukumba. Sebelum menjadi kelurahan, Desa Tanah Kongkong merupakan desa yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam hal ini, yakni melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat desanya maka dari itu aparat desa menyetujui peraturan daerah Kabupaten Bulukumba yaitu merubah status desa menjadi kelurahan. Setelah melakukan perubahan, wilayah desa tanah kongkong terbagi menjadi 4 kelurahan, yaitu: Kelurahan Tanah Kongkong, Kelurahan Loka, Kelurahan Kasimpureng dan Kelurahan Bintarore. Hal inilah yang penulis menilai adanya perubahan kualitas pelayanan setelah melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan berdasarkan latar belakang tersebut di atas. maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti, dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap Kualitas pelayanan di Kabupaten Bulukumba”

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana mekanisme dari perubahan status desa menjadi kelurahan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba ?
2. Apakah dampak perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme dari perubahan status desa menjadi kelurahan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak perubahan dari status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bulukumba.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Secara teoritis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan penunjang dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya, dan khususnya ilmu administrasi negara. Dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya serta

memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

b. Secara praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan aparat Pemerintah Kelurahan di kabupaten bulukumba pada khususnya dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan fungsi lainnya.

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

1. Pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹. Nampak bahwa Daerah memiliki unsur penting seperti masyarakat hukum, wilayah batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.

Otonomi Daerah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun unsur otonomi daerah tersebut adalah berisi hak wewenang dan kewajiban daerah secara mandiri mengatur dan mengurus pemerintahan yang dilandasi ketentuan hukum."¹⁰

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada Daerah, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

⁹ Pasal 1 (12) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

¹⁰ Pasal 1 (6) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, kepada Daerah dibantu oleh perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Selain dari itu, untuk meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Kelurahan dengan pertimbangan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan.

Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada Lurah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memverifikasikan tugas-tugas yang dilimpahkan secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan tuntutan masyarakat kota.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, maka Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk Pemerintahan Kelurahan, guna menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, dan berjalan sesuai dengan rencana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi

dan tugas pembantuan. Adapun Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah suatu Pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pemerintahan daerah hanya ada Pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Prinsip baru dalam Pasal 18 sesuai dengan gagasan daerah membentuk Pemerintah Daerah sebagai satuan Pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur Pemerintahan sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di daerah.¹¹

Sistem Pemerintahan Daerah menganut asas-asas sebagai berikut :

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah

¹¹ Huda Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia* : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 328

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.¹²

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia¹³. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8, mengartikan desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.¹⁴

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan :

- satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.
- Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas secara efektif dan lebih efisien
- Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.¹⁵

¹²Widjaja. HAW, 2005, *penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Palembang : Rajawali pers, hlm 25

¹³Huda Ni'matul, op.cit....hlm 329

¹⁴Pasal 1 (8) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹⁵Huda Ni'matul, op.cit....hlm 330

Desentralisasi tidak menjamin bahwa jumlah sumber yang besar dapat dihasilkan ditingkat daerah. Satu bentuk desentralisasi mungkin akan berhasil disuatu Negara, sedangkan di Negara-negara lain desentralisasi tidak berhasil. Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang dibuktikan oleh pengalaman sejumlah Negara berkembang tidak berarti bahwa usaha-usaha itu harus dihentikan.

Desentralisasi telah menciptakan hasil-hasil positif. Pertama, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) ke dalam sumber-sumber Pemerintah pusat telah meningkat. Kedua, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga-lembaga pemerintah pusat. Akhirnya berbagai sumber nasional pun tersedia untuk pembangunan daerah. Ketiga, di sejumlah Negara peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintah/organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan lambat. Keempat, organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Semua badan atau organisasi ini telah memberikan dampak yang cukup positif. Kelima, perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai suatu unsur penting dari strategi pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru ke dalam proses pembuatan keputusan.¹⁶

¹⁶Huda Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia* : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 332

b. Asas Dekonsentrasi

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 9 mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan Umum.¹⁷

Asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

- Dari segi wewenang asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah Pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya,
- Dari segi pembentuk pemerintah, berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat yang ada di daerah,
- Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah Negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah Negara menjadi wilayah-wilayah administratif.¹⁸

¹⁷ Pasal 1 (9) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

¹⁸Huda Ni'matul, op.cit.....hlm 333

c. Asas Pembantuan

Menurut pasal 1 angka 11 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.¹⁹

tugas pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya. Beda tugas pembantuan dengan tugas rumah tangga sendiri, disini urusannya bukan menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Kepada pemerintah lokal yang bersangkutan diminta untuk ikut membantu penyelenggaraannya saja. Oleh karena itu, dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan, wewenangnya mengatur dan mengurus, terbatas kepada penyelenggaraannya saja.

Tugas dan kewajiban daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah, dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas, yang disebut "*de oppedragen taak*". Atau tugas yang diperintahkan, yang menurut ketentuan dalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 12 Undang-undang Nomor 5

¹⁹ Pasal 1 (11) UU No. 23 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Tahun 1974 disebut tugas pembantuan atau yang yang sekarang populer disebut orang serta-tantra, *medebewind* atau *selfgovernment*, yakni tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh pemerintah atau oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*)

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (d) yang dimaksud tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Desa oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir (g), dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 butir 11, dinyatakan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi

kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi²⁰

3. Urusan Pemerintahan Daerah

Daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 12 ditegaskan bahwa “Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia²¹. Nampak bahwa Daerah memiliki unsur penting seperti masyarakat hukum, wilayah batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.

Otonomi Daerah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia²². Adapun unsur otonomi daerah tersebut adalah berisi hak wewenang dan kewajiban daerah secara mandiri mengatur dan mengurus pemerintahan yang dilandasi ketentuan hukum.

²⁰ Huda Ni'matul, op.cit....hlm 335

²¹ Pasal 1 angka (12) undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

²² Pasal 1 angka 6

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.²³

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

a. Urusan Pemerintahan Absolut.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

- politik luar negeri;
- pertahanan;
- keamanan;
- yustisi;
- moneter
- fiskal nasional;
- agama²⁴

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

- melaksanakan sendiri; atau
- melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.²⁵

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- pendidikan;
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang;
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

²⁴ Pasal 10 (1) UU No. 23 tahun 2013 tentang pemerintahan daerah

²⁵ Pasal 10 (2) UU No. 23 tahun 2013 tentang pemerintahan daerah

- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- tenaga kerja;
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- pangan;
- pertanahan;
- lingkungan hidup;
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- perhubungan;
- komunikasi dan informatika;
- koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- penanaman modal; kepemudaan dan olah raga;
- statistik;
- persandian;
- kebudayaan;
- perpustakaan; dan
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- kelautan dan perikanan;
- pariwisata;
- pertanian;
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.²⁶

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana

²⁶ Pasal 12 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.²⁷

c. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.²⁸ Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan umum meliputi:

- pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁷ Pasal 13 (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

²⁸ Pasal 9 ayat (1) No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

- koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.²⁹

B. Pelayanan Publik

Sebagai profesi pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 alinea Ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi :

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah, sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah.³⁰ Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan mempunyai implikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik³¹. Kurang baiknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di kelurahan. Jadi tidak heran lagi sering mendengarkan tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik merupakan citra buruk pemerintah di tengah masyarakat, bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluhkan, dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan.

1. Pengertian Pelayanan publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lingkungan Badan Usaha Milik

³⁰ Pasal 349 (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

³¹ Pasal 349 (3) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan jasa³².

Berdasarkan UU RI No. 25 tahun 2009 pengertian pelayanan publik, yaitu Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik³³. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

³² Sinambel Poltak Lijan, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, hlm 17

³³ Pasal 1 angka (1) Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Pelaksanaan pelayanan publik

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi tanggungjawab Pemerintah (eksekutif) Pasal 4 UUD 1\945. Atas asumsi tersebut maka penyelenggaraan pelayanan publik merupakan mandat bagi Negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban :

- menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- menempatkan pelaksana yang kompeten;
- menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai
- memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
- berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

- memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁴

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud diatas, sekurang-kurangnya meliputi:

³⁴ Pasal 15 UU No. 25 tahun 2014 tentang pelayanan Publik

- pelaksanaan pelayanan;
- pengelolaan pengaduan masyarakat;
- pengelolaan informasi;
- pengawasan internal;
- penyuluhan kepada masyarakat; dan
- pelayanan konsultasi.³⁵

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain. Pelaksana pelayanan publik yang disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup pelayanan publik

Dalam perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata.

Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

³⁵ Pasal 8 UU No. 25 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik

yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.³⁶

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif

³⁶ Sinambel Poltak Lijan, op.cit..... hlm 83

pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan³⁷

Ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi;

- a. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- c. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya

³⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik

menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

C. Desa dan Kelurahan.

Kelurahan dan Desa adalah merupakan sistem Pemerintahan yang berada pada unit terbawah pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, keduanya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun Dalam Pasal 229 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa :“Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat ”

1. Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.³⁹

Pengertian desa kemudian diterangkan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut :

³⁸ Pasal 5 Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

³⁹ Pasal 1 undang – undang no. 5 tahun 1979 tentang Desa

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- b. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.⁴⁰

Di Indonesia, istilah desa itu sendiri berbeda-beda di berbagai wilayah. Sebagian besar istilah tersebut umumnya sesuai dengan bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk setempat.

b. Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

⁴⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

⁴¹ Pasal 1 undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa

⁴² pasal 1 angka 3 undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa

⁴³Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Dalam Perubahan tentang desa menurut UU no. 5 tahun 1979 kepada desa menurut uu no. 22 tahun 1999 diperlukan pemahaman dan mengetahui perubahan fungsi dan peranan kepala desa sebagai akibat perubahan kedua undang – undang tersebut Pemerintahan desa dan perangkat desa serta masyarakat desa mengetahui perubahan nama, fungsi kelembagaan desa, hubungan vertical dan horizontal dan mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas⁴⁴

a) Kepala Desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

⁴⁴Widjaja. HAW, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*, Bukit besar : PT Raja Grafindo Persada, hlm 20

Adapun syarat wajib untuk mencalonkan menjadi kepala desa berdasarkan UU RI pasal 32 No. 6 tahun 2014 tentang desa. Meliputi ;

- warga negara Republik Indonesia;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- berbadan sehat;
- tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah

b) Perangkat Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ("PP 72/2005"). Menurut PP 72/2005, pengangkatan perangkat desa ini merupakan salah satu tugas kepala desa secara mandiri, tidak ada campur tangan atau rekomendasi dari camat. Berangkat dari tugas itu, pihak yang keberatan dengan keputusan kepala desa dapat

mengambil langkah soal kecacatan hukum dalam pengangkatan perangkat desa itu, yakni dengan mengajukan keberatan kepada kepala desa yang kemudian diputuskan apakah diselenggarakan seleksi ulang kemudian memberhentikan perangkat desa atau tidak. Hal ini merupakan wewenang kepala desa. Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa
- b. pelaksana kewilayahan
- c. pelaksana teknis.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. dan perangkat desa bertanggung jawab oleh kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁵

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur

⁴⁵ pasal 50 undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang desa

dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

c. Otonomi Desa

Otonomi desa adalah gambaran tentang desa yang mandiri, memiliki hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri dan mampu memberikan kesejahteraan, kerukunan dan kedamaian bagi warga desa.

Masyarakat desa yang otonom adalah masyarakat yang membawa dalam dirinya sendiri unsur kemerdekaan dan kebebasan. Kebebasan dan kemerdekaan untuk berperaturan sendiri dan mengatur dirinya sendiri. Tetapi sifat masyarakat otonom selalu statis. Otonomi desa, sebaliknya. Ia adalah capaian dari usaha desa yang dilandasi motivasi. Motivasi untuk berada pada pusat hubungan antar agen atau subjek. Desa yang memiliki otonomi adalah desa yang memenangkan pertempuran agenda antar subjek. Desa yang mampu menduduki pusat hubungan, mempengaruhi tujuan agen yang lain, dan dengan demikian menjadikan agendanya sebagai agenda umum.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki

kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengaturnya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Undang – undang No. 22 tahun 1999 mengatur mengenai desa (BAB XI, Desa) pada pasal 93 sampai dengan pasal 111, merupakan masa transisi dan memberikan landasan yang kuat menuju "*Development Community*", dimana desa tidak lagi merupakan level administrasi terendah, tidak lagi menjadi bawahan daerah, tetapi lebih merupakan "*Independent Community*"⁴⁶

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul

⁴⁶Widjaja.HAW, op.cit.... hlm 85

dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁷

2. Kelurahan.

Pengertian Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (5) dan pasal 2 ayat (1) sampai ayat (6) adalah sebagai berikut : “Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan “.dan ketentuan lebih lanjutnya dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupatenn/Kota.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Ayat (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota

⁴⁷ Ibid, hlm 165

melalui Camat. Ayat (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan pada ayat 4 memuat syarat untuk menjadi seorang pejabat lurah sebagaimana pada ayat (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
- Masa kerja minimal 10 tahun.
- Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

a. Fungsi Kelurahan

Sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana salah satu pasalnya mengatur tentang pembentukan kelurahan yang tertuang dalam Pasal 229:

- 1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- 2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- 3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi kelurahan sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- d. Membina lembaga kemasyarakatan
- e. Membina dan mengendalikan administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dimana kita ketahui sebelum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan maka pedoman dalam pelaksanaan Pemerintahn Daerah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci tentang pembentukan kelurahan sebagaimana pada pasal 2 (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Selanjutnya pada ayat (4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung. (5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

b. Struktur dan Kelembagaan.

Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁸ Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan

⁴⁸ Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.⁴⁹

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

⁴⁹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian ini adalah karena pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) saya berada di lokasi kemudian saya melakukan observasi di kelurahan tersebut dan hasil observasi ini adalah terjadinya perubahan dari kualitas pelayanan di Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari undang-undang, buku-buku, arsip atau sumber lain yang dapat menjadi factor penunjang dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- Mempelajari buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek dan materi penulisan penelitian ini;
- Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara pidana ini;
- Mempelajari materi kuliah, seminar-seminar dan tulisan-tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian ini Penulis langsung ke lokasi penelitian untuk meminta data-data dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menyangkut dengan objek penelitian.

D. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi target dalam kajian penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur pemerintahan Kelurahan Tanah Kongkong di Kabupaten Bulukumba.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau himpunan bagian dari populasi yang dipilih dengan teknik purposive random sampling dimana setiap populasinya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Mekanisme Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dilihat dari latar belakang diubahnya bentuk pemerintahan desa menjadi kelurahan bukan disebabkan karena adanya kebutuhan, tetapi karena tuntutan perundang-undangan maka mau tidak mau, siap tidak siap, semua pemerintahan desa yang berada di wilayah kota harus berubah menjadi kelurahan. Menindaklanjuti isi dari pasal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan. Kepmendagri tersebut merupakan pedoman bagi daerah kabupaten dan kota serta DPRD dalam menetapkan peraturan daerah kabupaten dan kota mengenai pembentukan kelurahan. Pembentukan kelurahan diartikan sebagai pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana ditegaskan dalam Kepmendagri No. 65 Tahun 1999, adalah merupakan kebijakan atau upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan serta mendekatkan pelayanan

terhadap masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat. Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.

Penghapusan dan penggabungan Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing. Hasil musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan. Keputusan Bersama Kepala Desa disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Hasil penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat. Aspirasi masyarakat disetujui 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Dengan beralihnya status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat - istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan. Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa yang berubah statusnya, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai nilai - nilai sosial budaya masyarakat setempat. Tata cara pemberhentian Kepala Desa dan Anggota BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Adapun syarat – syarat untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan, yaitu ;

- luas wilayah tidak berubah;
- jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
- sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencarian;
- kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- meningkatnya volume pelayanan.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba pasal 10 No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 kemungkinan besar semua perangkat desa dapat diangkat atau memenuhi syarat untuk menjadi perangkat kelurahan, karena Pemerintah kelurahan pada saat itu bukan merupakan lembaga struktural.

Mekanisme Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten bulukumba sudah diatur oleh Peraturan Daerah Kab. Bulukumba pasal 11 No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, yang berbunyi :

- 1) Tata cara perubahan status desa, sebagai berikut :
 - a. adanya prakarsa masyarakat dan kesepakatan untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
 - b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa kepada BPD dan Kepala Desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa, kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa kepada Bupati melali camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
 - e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. jika rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status desa, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- 2) Tim observasi Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.⁵¹

⁵¹Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba pasal 11 No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ini sangat kurang Karena setelah terbuat Peraturan Daerah tersebut tidak adanya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada Masyarakat Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan pasal 11 Undang – undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa dan Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota⁵²

Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan tersebut dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.

⁵² Pasal 11 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ditetapkannya status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa tersebut dialihkan menjadi aset kelurahan. Pengalihan sarana dan prasarana tersebut berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat yang selanjutnya dibuat berita acaranya. Sarana dan prasarana tersebut selanjutnya dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Menurut Akhmad Ihwan Noor, S.Pd., M.Adm. Pemb⁵³ dalam wawancara yang dilakukan penulis, bahwa :

“Sebagaimana diketahui bahwa seluruh desa yang berada di area wilayah kota baik kabupaten maupun kecamatan akan berubah status menjadi kelurahan. Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan akan mengakibatkan dampak positif

⁵³ Lurah Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, tanggal 12 Januari 2016

karena perangkat kelurahan terdiri dari pegawai negeri sipil, yaitu pejabat struktural yang dapat diawasi lebih ketat oleh atasannya secara struktural pula yang mengakibatkan pelayanan yang lebih prima dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera.”

Menurut pasal 12 Undang – undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa. Pendanaan perubahan status kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁴

B. Dampak Perubahan dari Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Bulukumba

Berlandaskan Undang – undang tentang Desa tersebut maka dapat di katakan bahwa pada prinsipnya sebuah pemerintahan termasuk pemerintahan desa bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, sesuai dengan makna utama dari Pemerintahan Desa tersebut sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang

⁵⁴ Pasal 12 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

memungkinkan setiap anggotanya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) sudah selayaknya memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga berdampak terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri.

Perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kabupaten, dalam hal ini kabupaten Bulukumba telah membuat peraturan, yaitu Peraturan Daerah (PERDA). Keputusan pemerintah kabupaten Bulukumba melalui mekanisme yang telah disepakati bersama dengan DPRD Bulukumba yang menghasilkan suatu rancangan peraturan tentang pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Menurut Alamsyah A. Adnan, S.E,⁵⁵ bahwa :

“Perubahan ini merupakan bentuk dari peningkatan status yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.”

Peraturan daerah (PERDA) kabupaten Bulukumba telah menghasilkan perubahan desa menjadi kelurahan dimana salah satunya adalah Desa Tanah Kongkong menjadi kelurahan Tanah Kongkong yang telah disepakati oleh DPRD.

⁵⁵Kasi Kessos dan Kepemudaan Kelurahan Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, tanggal 15 Januari 2016

Dalam kualitas pemerintah desa sangat jauh dibandingkan dengan pemerintah kelurahan. Hal ini disebabkan karena telah terjadi perubahan tingkat pelayanan baik dari segi pemerintahan terutama pelayanan yang terstruktur dalam tugas aparat. Pelayanan di desa belum maksimal.

Menurut Sahiruddin⁵⁶ dalam wawancara yang dilakukan penulis, menjelaskan bahwa :

Adapun faktor – faktor perubahan Desa Tanah Kongkong menjadi kelurahan, yaitu :

- a. Kurangnya pengelolaan pelayanan masyarakat
- b. Terjadinya Diskriminasi kepada masyarakat desa dalam memberikan pelayanan.
- c. Pengelolaan dana desa kurang terarah.
- d. Kurangnya pengetahuan proses pelayanan administrasi terhadap aparat desa
- e. Proses administrasi pada jam kerja di kantor pelayanan desa tidak menentu dan sangat lama.
- f. Kurangnya Sumber daya manusia yang bekerja di pemerintahan desa.

Dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih maju, Desa Tanah Kongkong menerapkan Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba dan telah disepakati oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, sangat

⁵⁶ Sekretaris Kelurahan Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, tanggal 1 Januari 2016

mempengaruhi pelayanan ditingkat daerah khususnya di kelurahan. Ini disebabkan karena pegawai yang ditempatkan pada kantor kelurahan adalah PNS yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar berdasarkan UU kepegawaian. Beda dalam tingkat desa pegawai yang ada kebanyakan dari kalangan non PNS yang tidak menerima gaji dari kantor desa, sehingga pegawainya banyak diluar kantor untuk mencari mata pencarian.

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut dan dilaksanakan maka akan menambah kerja atau jabatan dan usulan pada pemerintahan kabupaten sehingga masyarakat kelurahan tanah kong kong yang telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bisa mempunyai jabatan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan diharapkan memberi dampak yang lebih baik dalam memberikan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perubahan status tersebut tata kelola pemerintahan kelurahan dikelola secara professional, oleh karena pengelolanya pada umumnya direkrut dari sumber daya yang sudah berstatus PNS, khususnya yang menjabat sebagai lurah. Persyaratan untuk menjadi lurah tentu minimal kualifikasi pendidikan S1. Sementara persyaratan untuk menjadi kepala desa minimal ijazah SMA. Dengan perbedaan kualifikasi pendidikan, maka tata kelola pemerintahan lebih baik dari tata kelola pemerintahan desa. Dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan otomatis akan menambah kursi jabatan yang berwenang, dan akan

diisi oleh pegawai yang bersyarat untuk menduduki jabatan tersebut.

Menurut Akhmad Ihwan Noor, S.Pd.,M.Adm.Pemb⁵⁷ dalam wawancara yang dilakukan penulis, bahwa:

“Sebagaimana diketahui bahwa perangkat kelurahan itu terdiri dari PNS yang tentunya mempunyai aturan kepegawaian yang salah satunya adalah menyangkut :

- a. Kedisiplinan kerja
- b. Pelayanan prima
- c. Jadwal jam kerja yang tepat

Semua unsur ini yang menyebabkan bagi aparat kelurahan harus betul-betul disiplin dalam menjalankan tugas untuk pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Menurut Haris. S, S.E⁵⁸, yaitu :

“Setelah diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan telah terjadi perubahan, yaitu dari segi pelayanan :

- a. Lurah yang diangkat oleh bupati adalah yang berkualitas dan kualifikasi pendidikan minimal S1.
- b. Tidak terjadi konflik pada saat penentuan posisi lurah
- c. Tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- d. Proses Administrasi dan pelayanan lebih terarah
- e. Dengan Adanya dasar peraturan ini semua penyelenggaraan koordinasi aparatur pemerintahan dapat membantu pelayanan masyarakat.”

Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat

⁵⁷ Lurah Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, tanggal 12 Januari 2016

⁵⁸KASUBAG Perangkat Kecamatan dan Kelurahan. Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tanggal 13 Januari 2016

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri.

Kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari sistem kemampuan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menumbuhkan serta memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

Menurut Sabir, ⁵⁹ yaitu ;

“Adapun dampak setelah Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Bulukumba Kelurahan Tanah Kongkong, yakni :

- a. Tanggung gugat, yaitu berkenaan dengan meningkatnya kesadaran tentang keinginan dari aparatur negara untuk memberikan pertanggungjawaban (*accountability*), dan kewenangan memegang tanggung gugat. Dalam hal ini aparatur pemerintahan harus bertindak, tetapi dalam cara bertindak disebut harus dapat mempertanggungjawabkan kewenangannya.
- b. Transparan (keterbukaan), yaitu bertalian dengan keinginan menyelenggarakan administrasi negara yang terbuka dan mudah dijabarkan yang berlandaskan susunan konstitusional dan keabsahannya.
- c. Efisien dan efektif, yaitu berhubungan dengan kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanfaatan segala sumber daya dan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan.

⁵⁹ Kepala Lingkungan Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tanggal 14 Januari 2016

- d. Pertanggungjawaban, yaitu ikut serta menciptakan suatu kondisi masyarakat dimana masyarakat dan aparatur negara yang melaksanakan tugas memberikan dukungan kepada kelembagaan masyarakat tentang hasil-hasil dari tugas sosialnya.
- e. Partisipatif, yaitu jaminan bahwa perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat di dalam masyarakat keseluruhan telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyatakan keinginan-keinginan dan harapan-harapan mereka terhadap pemerintah.
- f. Keadilan, yaitu berkaitan dengan suatu jaminan bahwa terdapat keadilan dan pendistribusian yang cukup atas sumber-sumber bagi mereka yang berhak menerimanya.
- g. Bersih, dalam arti perilaku seluruh aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, moral, serta sikap tindak-tanduknya dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Bulukumba merupakan penetapan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan yang ditindak lanjuti oleh DPRD Kabupaten Bulukumba. Lalu, Penghapusan dan penggabungan Desa untuk menjadi kelurahan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.dengan dasar hukum, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan. Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.Keputusan Bersama Kepala Desa disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.Hasil penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
2. Dampak perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Bulukumba, yaitu kualitas Pemerintah Desa yang

sangat jauh dibandingkan dengan pemerintah kelurahan. Hal ini disebabkan karena telah terjadi perubahan tingkat pelayanan baik dari segi pemerintahan terutama pelayanan yang terstruktur dalam tugas aparat. Dalam tingkat Desa pegawai yang ada kebanyakan dari kalangan non PNS sehingga pelayanan tidak maksimal karena dari segi ilmu pengetahuan dalam pemerintahan dan pelayanan sangat kurang. Setelah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Desa Tanah Kongkong telah berubah status menjadi Kelurahan, Dengan perubahan status tersebut tata kelola pemerintahan kelurahan dikelola secara professional, oleh karena pengelolanya pada umumnya direkrut dari sumber daya yang sudah berstatus PNS dan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Lebih Maksimal dari pada sebelumnya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada unsur pemerintah desa tentang makna, hakekat, dan tujuan dari perubahan status desa menjadi kelurahan serta peraturan Pemerintah Kabupaten Bulukumba baik melalui sosialisasi maupun pengarahan atau melakukan pembahasan bersama untuk memperjelas mengenai sistem mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut.

2. Bagi Desa yang sudah berubah Status menjadi Kelurahan agar perlu adanya studi kelayakan lebih lanjut apabila akan ada kebijakan

peningkatan status desa jadi kelurahan dan Peningkatan fasilitas dan kapasitas di Kelurahan agar pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bulukumba lebih nyaman. lalu, Desa yang belum berubah status menjadi Kelurahan melakukan musyawarah kepada Badan Perwakilan Desa (BPD), Aparatur Desa dan masyarakat untuk membahas peningkatan fasilitas dan kapasitas agar dapat mengajukan melakukan perubahan status ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Muljadi, Arief. 2005, *Landasan Dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka: Surabaya
- Widjaja, HAW. 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan utuh*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Widjaja, HAW. 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Widjaya. HAW. 2001. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Radja Garfindo Persada : Jakarta
- Kansil, C.S.T. 2014, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Adminisrasi Daerah*, Remaja Rosdakarya: Jakarta
- Sarundajang. SH, 2001, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Simoranrangkir, J.C.T & Mang Reng Say, 1975, *Tentang dan Sekitar Undang-undang Dasar 1945*, Djambatan: Jakarta.
- Sinambela, Mahadi.& Ashari, 2003, *Dilema Otonomi Daerah dan Masa Depan Nasionalisme Indonesia*, Fatahillah: Yogyakarta.
- Huda Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada : Yogyakarta
- Hadjon M Philipus, DII, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta
- Ridwan. Hr, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Atmosudirdjo Prajudi, 1994, *Hukum Admnistrasi Negara*, Ghalia Indonesia : Jakarta

B. Peraturan perundang – undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- 6) Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik

<file:///C:/Users/Lestari/Documents/Sistem%20Pemerintahan%20Daerah%20-%20Otonomi%20Daerah.htm>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN UJUNGBULU

Jl. Yos Sudarso No. 34 ☎ (0413) 83316 Kode Pos 92551

Bulukumba, 14 Januari 2016

Nomor : 01 /Pem-UB/ I /2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. – Lurah Terang-Terang
- Lurah Tanah Kongkong
Di-

Tempat

Berdasarkan surat dari Kantor Kesbang Dan Politik Nomor : 070/06/Kesbangpol/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 Perihal Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : **ANDI NUR REZKY LESTARI**
NIM : B12112132
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Taman Telkomas Jl.Radio Raya Perm.Golden Hills

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul ***"TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KABUPATEN BULUKUMBA (Kelurahan Terang-Terang dan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu)."*** yang akan berlangsung pada 14 Januari s/d Februari 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT UJUNG BULU
Kasubag. Umum & Kepeg.


FITRIANI, S. IP
Pangkat : Penata Muda TK. I
Nip. 19910416 201010 2 001

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN UJUNGBULU
KELURAHAN TANAHKONGKONG**

Alamat : DR. Muh. Hatta Bulukumba

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 02 / TK / S / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Akhmad Ikhwan Noor, S.Pd., M.Adm.Pemb**

Nip : 19671004 198903 1 011

Jabatan : Lurah Tanah Kong Kong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Andi Nur Rezky Lestari**

Tempat & Tanggal Lahir : Kendari, 20 Mei 1994

NIM : B 121 12 132

Jurusan : Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara UNHAS

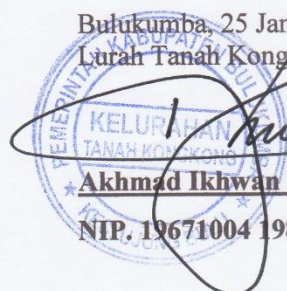
Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Tanah Kong Kong tahun pelajaran 2016/2017 terhitung sejak Januari s/d Februari dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terhadap Kualitas Pelayanan di Kabupaten Bulukumba.”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 25 Januari 2016

Lurah Tanah Kong - kong


Akhmad Ikhwan Noor, S.Pd., M.Adm.Pemb
NIP. 19671004 198903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Nomor : 070/06/Kesbangpol/I/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi.

Bulukumba, 14 Januari 2016
Kepada
Yth. Camat Ujungbulu

di-
Jl. Yos Sudarso

Berdasarkan Disposisi Bapak/Saudara untuk direkomendasikan dan Surat Direktur Universitas Negeri Makassar Nomor 78/UN4.6/PL.02/2016 tanggal 5 Januari 2016 Perihal Penelitian..

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : ANDI NUR REZKY LESTARI
Tempat/Tgl Lahir : Kendari, 20-05-1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi UNM
Alamat : Taman Telkomas Jl. Radio Raya Perm. Golden Hills II No. A6

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/ di Daerah/Instansi saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul :
" TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI KABUPATEN .BULUKUMBA (Kelurahan Terang-Terang dan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu)".

Selama : Tmt. 14. Januari s/d Februari 2016
Pengikut/Ang. Team : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba
2. Penelitian /Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) Exp. Copy hasil "SKRIPSI" kepada Bupati Bulukumba Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.



AN. KEPALA KANTOR

KASI IDEOLOGI POLITIK & WASBAN

ANDEMAPPATUNRU ASNUR, S.STP, M.Si

Pangkat : Penata

NIP : 19960423 200412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab. Bulukumba
3. Yang bersangkutan
3. Pertinggal